

**IMPLEMENTASI HUKUM BANTUAN SOSIAL USAHA EKONOMI
PRODUKTIF KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) UNTUK
KESEJAHTERAAN SOSIAL PEREMPUAN
(Studi di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten
Banyumas)**

Oleh:

**WIDYA OKTAVIANI
E1A021152**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi hukum bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk kesejahteraan sosial perempuan dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini berlokasi di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum bantuan sosial UEP kepada KUBE untuk kesejahteraan sosial perempuan di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas telah terimplementasi dengan baik yang dapat dibuktikan dengan parameter baiknya implementasi pemenuhan kriteria dan persyaratan penerima bantuan sosial usaha ekonomi produktif; baiknya implementasi bentuk bantuan sosial usaha ekonomi produktif; baiknya implementasi mekanisme permohonan dan pencairan usaha ekonomi produktif; baiknya implementasi pendampingan bantuan sosial usaha ekonomi produktif; baiknya implementasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bantuan sosial usaha ekonomi produktif; baiknya implementasi keberlanjutan dan dampak bantuan sosial usaha ekonomi produktif pada kesejahteraan sosial perempuan. Faktor yang memengaruhi implementasi hukum bantuan sosial UEP kepada KUBE untuk kesejahteraan sosial perempuan yaitu faktor yang mendukung meliputi, tersedianya aturan mengenai bantuan sosial UEP kepada KUBE, strategi penargetan melalui rekomendasi KPM-PKH, adanya embrio usaha yang sudah dimiliki calon anggota KUBE, besarnya antusiasme masyarakat dalam membentuk dan mendaftar KUBE, adanya pelatihan dari pendamping kepada KUBE, semangat gotong royong antar anggota KUBE, partisipasi aktif dari anggota KUBE perempuan. Faktor penghambat meliputi kurang memadainya stok bahan baku yang memperlambat pelaporan SPJ, kondisi geografis beberapa tempat KUBE yang susah dijangkau ketika proses pemantauan dan evaluasi

Kata Kunci : *Bantuan Sosial ; Implementasi Hukum ; Kesejahteraan Sosial Perempuan ; KUBE ; UEP*

**LEGAL IMPLEMENTATION OF PRODUCTIVE ECONOMIC ENTERPRISE
SOCIAL ASSISTANCE FOR KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)
FOR THE SOCIAL WELFARE OF WOMEN
(Study at the Social and Community Empowerment Agency of Banyumas
Regency)**

By:

**WIDYA OKTAVIANI
E1A021152**

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal implementation of Usaha Ekonomi Produktif (UEP) social assistance for Kelompok Usaha Bersama (KUBE) for women's social welfare and the factors influencing it. This research is a qualitative study with an empirical juridical approach, located at the Social and Community Empowerment Agency of Banyumas Regency. The data used were primary and secondary data. The results of the study show that the legal implementation of UEP social assistance for KUBE for women's social welfare at the Social and Community Empowerment Agency of Banyumas Regency has been well implemented, which can be proven by the good implementation of the following parameters: fulfillment of the criteria and requirements for social assistance recipients; fulfillment of the form of social assistance; the mechanism for UEP application and disbursement; UEP social assistance accompaniment; monitoring, evaluation, and reporting of UEP social assistance; and the sustainability and impact of UEP social assistance on women's social welfare. The factors influencing the legal implementation of UEP social assistance for KUBE for women's social welfare include supporting factors such as the availability of regulations regarding UEP social assistance for KUBE, a targeting strategy through KPM-PKH recommendations, the existence of a business embryo already owned by prospective KUBE members, high community enthusiasm in forming and registering KUBE, training provided by companions to KUBE, a spirit of mutual cooperation among KUBE members, and the active participation of women KUBE members. Inhibiting factors include the inadequate supply of raw materials, which slows down the SPJ reporting process, and the geographical conditions of some KUBE locations, which are difficult to reach during monitoring and evaluation.

Keywords: Social Assistance; Legal Implementation; Women's Social Welfare; KUBE; UEP